

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Faktor Internal

Motivasi didefinisikan sebagai proses yang menjelaskan mengenai kekuatan, arah, dan ketekunan seseorang dalam upaya untuk mencapai tujuan. Kast dan Rosenzweig (2005) mendefinisikan Motif sebagai sesuatu yang menggerakkan seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu atau setidaknya untuk mengembangkan suatu kecenderungan perilaku yang khas. Motivasi dapat didefinisikan sebagai satu kekuatan dalam diri seseorang yang mendorong atau menggerakkannya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dasarnya. Tingkat kebutuhan akan memutuskan penghargaan seperti apa yang akan memuaskan seorang pekerja. Menurut Dessler (2006), kebanyakan psikolog meyakini bahwa semua motivasi berasal dari suatu ketegangan yang terjadi jika satu atau lebih kebutuhan penting kita tidak terpenuhi.

Maslow (1970), mengemukakan bahwa dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan pokok. Dalam teori ini terdapat 5 tingkatan dan tingkatan itu dikenal dengan sebutan hirarki kebutuhan Maslow. Berikut 5 tingkatan dalam mempengaruhi teori motivasi:

1. Kebutuhan fisiologikal. seperti : rasa lapar, haus, istirahat dan sex;
2. Kebutuhan rasa aman. tidak dalam arti fisik semata, akan tetapi juga mental, psikologikal dan intelektual.
3. Kebutuhan sosial. Kebutuhan seorang akan kasih sayang, rasa memiliki fisik yang akan terus terpenuhi.
4. Kebutuhan akan penghargaan. yang pada umumnya tercermin dalam berbagai simbol-simbol status.
5. Kebutuhan aktualisasi diri dalam arti tersedianya kesempatan bagi seseorang untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya sehingga berubah menjadi kemampuan nyata.

Jika pekerjaan telah memenuhi beberapa kebutuhan yang lebih tinggi maka hal tersebut akan menentukan dalam motivasi kerja. Tingkat aspirasi sangat

berhubungan erat dengan hirarki kebutuhan, dan sikap akan menentukan jalan yang akan ditempuh seseorang untuk pencapaian kebutuhannya. Kategori kebutuhan yang paling pokok yang dikemukakan Maslow adalah aktualisasi diri. Keyakinan akan hal ini merupakan dasar asumsi teori Y McGregor tentang motivasi yang didasarkan pada pengaturan diri, pengendalian diri, motivasi dan kematangan.

Kepuasan pekerjaan yang terbentuk dari dua sifat yang unipolar tidak unik tetapi tetap menjadi konsep yang sulit untuk dipahami. Kebalikan dari kepuasan pekerjaan bukan ketidakpuasan pekerjaan tetapi lebih pada tidak ada kepuasan dalam pekerjaan. Jadi kebalikan dari ketidakpuasan pekerjaan adalah kepuasan pekerjaan, bukan ketidakpuasan dengan pekerjaan seseorang.

Ada tiga kondisi psikologi yang penting yang sangat mempengaruhi kepuasan petani:

1. Pengalaman yang berarti terhadap pekerjaan itu sendiri.
2. Tanggung jawab terhadap pekerjaan dan hasilnya.
3. Pengetahuan tentang hasil dan umpan balik kinerja.

Kita harus menyadari bahwa orang ingin berbagai hal yang berbeda dari pekerjaan mereka, dan terdapat tipe kepemimpinan yang berbeda juga, tidak ada satu cara motivasi yang akan memuaskan setiap orang. Karena motivasi memberikan arah dan intensitas terhadap perilaku manusia. Orang akan sangat termotivasi ketika mereka percaya (1) bahwa perilaku mereka akan memberikan imbalan tertentu, (2) Imbalan tersebut bermanfaat dan bernilai, dan (3) mereka dapat melakukannya pada level yang akan menghasilkan pencapaian imbalan tersebut.

2.1.2 Faktor Eksternal

2.1.2.1 Kebijakan Pemerintah

Salah satu pendorong konversi lahan adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang dikeluarkan pemerintah terkait dengan peruntukan dan pengelolaan lahan sawah. Pembahasan dan penanganan masalah alih fungsi lahan pertanian yang dapat mengurangi jumlah lahan pertanian, terutama

lahan sawah, telah berlangsung sejak dasawarsa 90-an. Akan tetapi sampai saat ini pengendalian alih fungsi lahan pertanian belum berhasil diwujudkan.

Secara umum peraturan/perundangan tentang perlindungan lahan pertanian yang ada saat ini hanya bersifat himbauan tanpa disertai sanksi dan pengawasan dari pemerintah. Untuk memperbaiki kinerja peraturan yang ada dalam menekan laju konversi lahan sawah pemerintah kemudian mengeluarkan aturan baru melalui Undang-undang (UU) 41 tahun 2009, dimana setiap pelaku baik petani, pejabat maupun badan usaha yang melakukan alih fungsi lahan akan dikenakan hukuman pidana dan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Irawan (2008) menyatakan bahwa dengan adanya kemandirian yang luas kepada daerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan pada era otonomi daerah, menyebabkan implementasi kebijakan alih fungsi lahan tergantung kepada kemauan politik kepala daerah. Persaingan antara sub sektor perkebunan yang secara ekonomis lebih banyak mendatangkan PAD kepada Pemerintah Daerah jika dibandingkan dengan sub sektor tanaman pangan menyebabkan Pemerintah Daerah terkesan kurang mempertimbangkan aturan tentang alih fungsi lahan tanaman pangan.

Peraturan Pemerintah Republik Pemerintah No 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bahwa alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah perubahan fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi bukan lahan pertanian pangan berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara. Widiyasa (2017) menyatakan pengendalian yang dilakukan melalui pendekatan peraturan salah satunya dapat dilakukan dengan melakukan proses menetapkan lahan sawah menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Lahan yang dapat ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi kriteria seperti berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi; memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan yang sangat sesuai,

sesuai, atau agak sesuai untuk peruntukan pertanian pangan; didukung infrastruktur dasar; dan telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan. Usulan penetapan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diusulkan oleh Kepala Dinas kabupaten/kota kepada bupati/walikota untuk ditetapkan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kabupaten/kota dalam rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Rencana tata ruang wilayah atau RTRW adalah hasil perencanaan ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya. Rencana tata ruang dibuat karena pada dasarnya ruang memiliki keterbatasan, oleh karena itu dibutuhkan peraturan untuk mengatur dan merencanakan ruang agar dapat dimanfaatkan secara efektif. Pemerintah Kota Tasikmalaya mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No 10 Tahun 2016 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Tasikmalaya Tahun 2016-2036. RDTR Kota Tasikmalaya adalah penjabaran dan pendetailan RTRW yang bersifat operasional sebagai landasan di dalam mengeluarkan izin pembangunan. Dalam peraturan daerah tersebut, pasal 47 menyebutkan bahwa zona pertanian meliputi: zona pertanian lahan basah; zona pertanian lahan kering dan zona perikanan.

2.1.2.2 Aspek Sosial

Lingkungan sosial masyarakat petani adalah kehidupan manusia yang berdiam dan mengembangkan kehidupan sosialnya di lingkungan masyarakat petani. Lingkungan masyarakat petani data digolongkan ke dalam tiga kelompok, yaitu:

1. Petani pedesaan yang masih hidup dengan cara pertanian yang sangat sederhana dengan tetap mempertahankan kehidupan berburunya dan melakukan pertanian secara berpindah.
2. Masyarakat petani modern seperti di negara-negara maju di Eropa, Amerika, dan Australia. Masyarakat petani golongan ini disebut *farmer* yang hidup di pedesaan modern.
3. Masyarakat petani yang secara teknologi, ekonomi, dan sistem sosialnya berada di antara kedua golongan masyarakat petani. Masyarakat petani ini

banyak ditemukan di negara-negara berkembang, salah satunya di Indonesia. Masyarakat ini dicirikan dengan kondisi budaya, ekonomi, sosial, dan demografi yang sangat heterogen.

Lingkungan sosial masyarakat petani pinggiran kota pada umumnya hampir sama dengan kondisi lingkungan sosial masyarakat petani lainnya. Namun, masyarakat petani ini berada dalam lingkungan sosial yang semakin tertekan oleh perkembangan sosial-ekonomi yang banyak membutuhkan ruang. Petani pinggiran kota merupakan salah satu contoh masyarakat petani yang termasuk dalam kelompok ketiga. Dalam kondisi seperti itu, di satu sisi ada petani yang merespon positif dengan berupaya memanfaatkan lahan pertanian secara intensif, sebagai jawaban atas meningkatnya permintaan akan komoditas pertanian.

Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, pasal 4 ayat (1) dan (2) menentukan adanya macam-macam hak atas tanah yang dipunyai oleh individu maupun badan hukum. Dinyatakan lebih lanjut dalam pasal 6 bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Hak atas tanah apapun pada seseorang tidak dapat dibenarkan apabila tanah itu dipergunakan atau tidak dipergunakan sematamata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Maksimum dan Minimum Tanah Pertanian bahwa jika tanah pertanian yang dikuasai itu merupakan lahan sawah dan tanah kering, untuk menghitung luas maksimum tersebut, luas sawah dijumlah dengan luas tanah kering dengan menilai tanah kering sama dengan sawah ditambah 30 persen di daerah-daerah yang tidak padat, 20 persen di daerah-daerah yang padat dengan ketentuan tanah pertanian yang dikuasai seluruhnya tidak boleh lebih 20 hektare. Atas dasar ketentuan tersebut maka penetapan luas maksimum untuk tiap-tiap daerah dilakukan menurut perhitungan yang telah ditetapkan dengan peraturan. Namun demikian, luas maksimum tidak berlaku terhadap tanah pertanian yang dikuasai dengan hak guna usaha atau hak-hak lainnya yang bersifat sementara dan terbatas yang diperoleh dari pemerintah serta tanah yang dikuasai oleh badan-badan hukum.

Dalam kenyataannya di lapangan masih banyak pihak termasuk para petani yang menganggap hak milik atas tanah adalah “mutlak”, sehingga dapat diartikan penggunaannya tergantung pada kehendak pemiliknya sendiri. Dalam kondisi seperti ini untuk mempertahankan suatu hamparan lahan agar tetap fungsinya sebagai lahan pertanian akan mengalami kesulitan. Tanah pada umumnya dipandang sebagai “asset” bagi pemiliknya. “nilai ekonomi” atas tanah lebih dipahami masyarakat dibandingkan dengan “fungsi sosialnya”. Maka oleh sebab itu dalam kondisi seperti ini lahan pertanian lebih mudah beralih fungsi, sesuai dengan keinginan pemiliknya menjadi peruntukan lain ketika dihadapkan dengan nilai ekonomi.

Berdasarkan fenomena tersebut di atas, dalam upaya mewujudkan ketersediaan lahan pertanian, disamping dilakukan melalui pendekatan sosial, juga harus dilakukan dengan pendekatan (nilai) ekonomis. Pemberian insentif atas kepemilikan lahan-lahan yang difungsikan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan salah satu pendekatan yang bijak dan harus dipikirkan lebih lanjut implementasinya.

2.1.2.3 Aspek Ekonomi

Fungsi lahan sawah bagi perekonomian manusia dapat dilihat dari berbagai macam fungsi ekonomi yang diberikan lahan sawah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung fungsi ekonomi lahan sawah dapat dilihat dari fungsi lahan sawah sebagai sumber pendapatan masyarakat maupun sebagai sumber pendapatan daerah. Sebagai sumber pendapatan masyarakat, lahan sawah telah menjadi salah satu tumpuan hidup bagi para petani yang menggantungkan hidupnya pada lahan sawah. Sebagian besar petani dalam memanfaatkan lahan sawah bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sehingga petani selalu berusaha meningkatkan hasil produksinya.

Lahan sawah juga merupakan sumber pendapatan masyarakat lainnya karena secara langsung lahan sawah telah menyediakan kesempatan kerja bagi para buruh tani. Semakin luas lahan sawah yang ada di suatu wilayah, akan semakin besar peluang kesempatan kerja dan semakin lama kegiatan usaha tani dilakukan. Besarnya peluang kerja ini telah memberikan sumber pendapatan bagi para buruh

tani yang terlibat dalam kegiatan usaha tani. Namun demikian, dewasa ini peluang kesempatan kerja pada lahan sawah semakin lama semakin terbatas sejalan dengan semakin sempitnya luas lahan sawah yang dimiliki petani sehingga kegiatan pertanian pada akhirnya kurang diminati karena tidak banyak memberikan pendapatan yang cukup, baik bagi pemilik lahan maupun para buruh tani.

Lahan sawah secara ekonomi juga telah memberikan sumbangan pendapatan yang berarti bagi pemerintah daerah melalui perhitungan pajak pendapatan daerah (PAD). Pada pertanian tanaman pangan, sumbangan terbesar diperoleh dari aktivitas pertanian lahan sawah. Hal ini dikarenakan secara keseluruhan kegiatan pertanian pada setiap daerah masih didominasi oleh pertanian lahan sawah. Fungsi ekonomi lain dari lahan sawah, yaitu lahan sawah secara ekonomi merupakan penghasil kebutuhan bahan pangan. Sebagai penghasil bahan pangan maka secara ekonomi keberadaan lahan sawah menjadi sangat penting. Bahan pangan yang dihasilkan lahan sawah cukup beragam, mulai dari bahan pangan pokok yang siap dikonsumsi maupun sebagai bahan industri.

2.1.2.4 Aspek Produktivitas Lahan Sawah

Produktivitas didefinisikan sebagai rasio dari output terhadap input. Pada kasus dimana ada satu output dan satu input, maka dapat dihitung produktivitas secara mudah. Produktivitas merupakan basis dari pengukuran kinerja. Kita dapat mengukur produktivitas dari suatu perusahaan, tetapi kita juga dapat mengukur produktivitas dari tenaga kerja, mesin, perusahaan-perusahaan, sektor industri, perekonomian nasional bahkan perekonomian global.

Lahan menurut Notohadiprawiro (1990) merupakan persatuan sejumlah komponen yang berpotensi sebagai sumber daya, dimana sumber daya lahan ditentukan oleh potensi sumber daya masing-masing yang menjadi komponennya, baik potensi bawaan maupun potensi yang berkembang dari nasabah saling tindak (*interactive relationship*) dan nasabah kompensatif (*compensatory relationship*) antar sumber daya. Berdasarkan konsep tersebut maka lahan mencakup semua sumber daya, yaitu sumber daya alam dan buatan, baik yang bersifat permanen maupun berulang menurut siklus alam. Sebagai salah satu sumber daya alam, lahan

mempunyai peran penting bagi manusia dalam melangsungkan kebutuhan hidup maupun kegiatan kehidupan social-ekonomi dan sosial-budaya.

Sawah adalah lahan usaha bidang pertanian yang secara fisik memiliki permukaan yang rata, dilengkapi dengan pematang dan tujuan utama pembukaan lahannya adalah untuk ditanami tanaman padi. Notohadiprawiro (2006) menyatakan sawah merupakan suatu sistem budi daya yang khas dilihat dari sudut khusus pertanaman, yaitu oadi, menyiapkan tanah, mengelola air dan dampaknya atas lingkungan. Berdasarkan beberapa konsep teersebut maka yang dimaksud dengan lahan sawah adalah suatu tipe penggunaan lahan untuk pengolahannya memerlukan genangan air, selalu mempunyai permukaan yang datar atau didatarakan (dibuat teras), dan dibatasi oleh pematang untuk menahan air genangan (Puslitbangtanah, 2003),

Pentingnya keberadaan lahan sawah menurut Mayrowani dan Yunus (2003, dalam Sudrajat, 2011) selain berfungsi menghasilkan beberapa komoditas primer seperti bahan pangan berupa padi dan palawija, juga mempunyai fungsi dalam pemeliharaan lingkungan, pelestarian sumber daya, dan fungsi social. Sebagai penghasil bahan pngan, keberadaan lahan sawah dapat secara langsung dirasakan oleh manusia. Tanaman padi sawah merupakan tanaman yang membutuhkan air dalam jumlah yang relatif lebih banyak daripada tanaman pangan lainnya, sehingga ketersediaan air irigasi menjadi faktor pembatas kegiatan usaha tani padi. Kurangnya ketersediaan air irigasi disebabkan oleh kondisi saluran irigasi yang rusak akibat kurangnya perawatan saluran oleh Pemerintah maupun rendahnya partisipasi masyakat dalam menjaga saluran irigasi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti	Judul penelitian	Tahun	Alat Analisis	Hasil penelitian
1	Rindang Baiq Aprildahani, Abdul Wahid Hasyim, Turniningtyas Ayu Rachmawati	Motivasi Petani Mempertahankan Lahan Pertanian di Wilayah Pinggiran Kota Malang (Studi Kasus Kawasan Perkotaan Karangploso Kabupaten Malang)	2017	<i>Structural equation modeling (SEM) jenis partial least square (PLS)</i>	Variabel laten kebijakan muncul dalam penelitian sebagai variabel sanksi terhadap alih fungsi lahan pertanian dan penyuluhan pertanian, sedangkan variabel laten sosial dalam penelitian adalah variabel keberadaan buruh tani dan status sosial dari lahan. Motivasi petani untuk mempertahankan lahan akan tinggi jika faktor kebijakan dan sosial dinilai baik.
2	Putri Sakinah, T. Makmur, Azhar	Motivasi Petani Dalam Upaya Pemanfaatan Lahan Tidur di Kecamatan Bada Kabupaten Aceh Besar	2017	<i>Analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif</i>	Motivasi dalam upaya pemanfaatan lahan tidur menjadi lahan pertanian yang yaitu motivasi sedang. Faktor yang memotivasi petani dalam upaya pemanfaatan lahan tidur menjadi lahan pertanian yang produktif yaitu terdiri dari dua faktor yaitu faktor ekonomi dan faktor sosial.
3	Sitty Muawiyah Panurat	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Petani Berusahatani Padi Di Desa Sedangkan Kecamatan Kakas Kabupaten Minahasa	2014	Analisis regresi linear berganda dengan alat IBM SPSS Statistics version 16	Luas lahan dan pendapatan berpengaruh sangat nyata terhadap minat petani. Sedangkan bantuan dan pengalaman berpengaruh nyata terhadap minat, sebaliknya pendidikan berpengaruh tidak nyata terhadap minat. Dengan nilai kontribusi Determinasi R ² faktor yang mempengaruhi adalah luas lahan, pengalaman, pendapatan, bantuan dan pendidikan sebesar 72%
4	Anang Khoiruz Rozak, Isyaturriyadhah, Evo Afrianto	Analisis Motivasi Petani Usahatani Padi Sawah di Desa Teluk Langkap Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo	2017	Analisis Chi Square dengan kontingen 2x2	Faktor yang terdapat hubungan terhadap motivasi petani padi sawah di Desa Teluk Langkap Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo adalah faktor kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman dan kebutuhan sosial. Sedangkan faktor yang tidak terdapat hubungan adalah faktor kebutuhan penghargaan dan aktualisasi diri
5	Agus Setiawan, Tetty Wijayanti	Faktor-Faktor Sosial Ekonomi Yang Memotivasi Petani Melakukan Usahatani Padi Sawah (Oryza Sativa L.) Di Kelurahan Bukuan Kecamatan Palkaran Kota Samarinda	2017	Analisis data kualitatif	Faktor-faktor sosial ekonomi terhadap motivasi petani yang memiliki peran paling besar dalam usahatani padi sawah di Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran yaitu pada faktor internal umur petani.

2.3. Pendekatan Masalah

Sampai saat ini, masih banyak permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan berbagai instrumen kebijakan sehingga tingkat efektivitasnya rendah. Dalam faktor ekonomi, Kebutuhan hidup dapat dipenuhi dari hasil usaha tani artinya lahan dapat menjadi sumber pendapatan. Lahan adalah sumber pemenuhan kebutuhan hidup petani dan keluarganya maka petani akan semakin bergantung pada lahan pertanian miliknya. Meskipun tidak ada jaminan

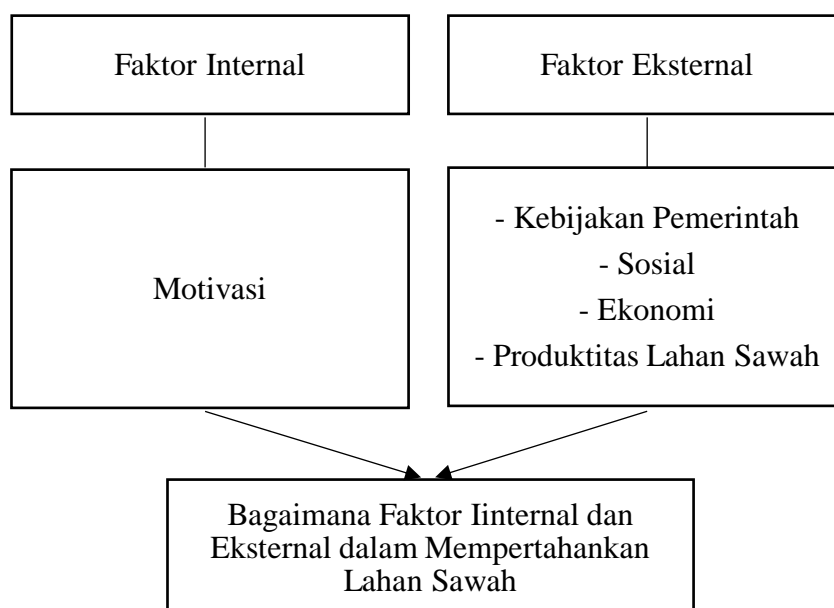
kesejahteraan dari usaha tani, tetapi mempertahankan lahan pertanian tetap merupakan jaminan untuk modal usaha seterusnya. Oleh karena itu, harga lahan pertanian yang tinggi tetap tidak mendorong petani untuk menjual lahannya. Selain itu, petani akan bergantung pada lahan pertanian miliknya jika lahan tersebut dapat memberikan pemenuhan kebutuhan pangan keluarga. Kebutuhan pangan yang dipenuhi dari hasil usaha tani sendiri berarti meringankan keuangan petani karena tidak perlu membeli lagi.

Kondisi sosial masyarakat mempengaruhi pola pikir masyarakat. Bagi petani, luas kepemilikan lahan akan sangat membatu dalam produksi di lahan tersebut. Apabila luas kepemilikan kecil, maka kondisi sosialnya tidak mendukung usahatani dan tidak senang. Apabila luas kepemilikan lahan besar, maka kondisi sosialnya mendukung usahatani dan senang. Untuk itu, kondisi sosial masyarakat perlu diperbaiki pola pikirnya. keberadaan buruh tani yang cukup tidak akan mempersulit petani dalam mencari bantuan usaha tani dan biaya usaha tani tidak akan meningkat karena upah buruh tani yang naik.

Produktivitas lahan pertanian berkurang dikarenakan ada beberapa faktor yang menghambat dalam produksinya. Untuk itu, petani sangat membutuhkan keperluan yang memadai untuk menanggulangi dari kekurangan produktivitasnya. Faktor kebijakan merupakan peraturan yang mengikat sehingga akibatnya akan langsung terasa. Jika materi kebijakan pemerintah semakin berpihak kepada petani dan dijalankan dengan baik di lapangan maka petani akan senang hati meneruskan usaha tani. Sebaliknya, jika materi kebijakan pemerintah tentang pertanian tidak memperhatikan kepentingan petani atau kebijakan sulit diaplikasikan maka sulit bagi petani untuk mempertahankan lahan pertanian. Faktor kebijakan sangat besar kontribusinya karena menjadi dasar dari kemudahan petani atau kesulitan petani. Penyuluhan pertanian akan membantu petani menyelesaikan kesulitan berusatani dan membantu petani mengembangkan usaha tani. Sarana dan prasarana yang memadai akan membantu petani dalam kebutuhan fisik di lahan pertanian. Pemberian insentif bagi petani akan meringankan biaya dalam produksi dari lahan pertanian. Jika alih fungsi lahan pertanian dibebaskan maka petani tidak akan bertahan terhadap pengusaha yang memiliki modal beli besar.

Selanjutnya, adanya interaksi sosial antara pemilik lahan sawah dengan penyewa atau penyakap. Kerja sama antara pemilik lahan sawah dengan petani penggarap terjalin berdasarkan kerja sama saling mufakat atau kesepakatan dengan asas kekeluargaan dan saling tolong menolong. Petani akan termotivasi dirinya untuk mempertahankan lahan sawah supaya di masa yang akan datang, petani dapat mempertahankan lahan sawahnya untuk keberlangsungan hidup. Motivasi akan sangat membantu petani dalam mempertahankan lahan sawah dari berbagai macam ancaman.

Purwasih & Kusumantoro, (2018) menjelaskan bahwa faktor internal dan faktor eksternal merupakan faktor yang dapat menyebabkan perubahan sosial. Faktor internal adalah faktor yang dapat menimbulkan pengaruh terhadap suatu hal yang berasal dari dalam diri pelaku. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang dapat menimbulkan pengaruh terhadap suatu hal yang berasal dari luar diri pelaku (Rasmikayati, dkk., 2020). Berdasarkan beberapa hasil penelitian di atas, bahwa faktor-faktor yang dapat memengaruhi petani dalam mempertahankan lahan sawah terdiri dari faktor internal dan eksternal.



Gambar 1. Pendekatan Masalah